

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI



**Model Pembaharuan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Jawa Timur
Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Di Pasar ASEAN**

Tahun ke I dari rencana 2 tahun

DR SIHABUDIN, SH., MH.	NIDN. 0016125903
DR. SUKARMI, SH., MH.	NIDN. 0022066607
SITI HAMIDAH, SH., MM.	NIDN. 0022066607
ADI KUSUMANINGRUM, SH., MH.	NIDN. 0013097902

Dibiayai oleh :
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Melalui DIPA Universitas Brawijaya
Nomor : DIPA-023.04.2.414989/2013, Tanggal 5 Desember 2012, dan berdasarkan
SK Rektor Universitas Brawijaya Nomor : 153/SK/2013 tanggal 28 Maret 2013

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Nopember 2013

HALAMAN PENGESAHAN

Judul	Model Pembaharuan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Jawa Timur Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Di Pasar ASEAN
Peneliti / Pelaksana	
Nama Lengkap	Dr. Sihabudin, SH, MH
NIDN	0016125903
Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
Program Studi	Ilmu Hukum
Nomor HP	08123176202
Alamat surel (e-mail)	hamidahamir@gmail.com
Anggota (1)	
Nama Lengkap	Dr. Sukarmi, SH, MH
NIDN	0003056704
Perguruan Tinggi Anggota	Universitas Brawijaya
(2)	
Nama Lengkap	Siti Hamidah, SH, MM
NIDN	0022066607
Perguruan Tinggi Anggota	Universitas Brawijaya
(3)	
Nama Lengkap	Adi Kusumaningrum, SH, MH
NIDN	0016125903
Perguruan Tinggi	Universitas Brawijaya
Institusi Mitra (jika ada)	
Nama Institusi Mitra	-
Alamat	-
Penanggung Jawab	-
Tahun Pelaksanaan	: Tahun ke I dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan	: Rp. 95.000.000,00
Biaya Keseluruhan	: Rp. 195.000.000,00

Malang, 30 Nopember 2013

Mengetahui,

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat



Ketua,

(Dr. Sihabudin, SH, MH)
NIP. 19591216 198503 1 001

Ringkasan:

*Tujuan Jangka panjang penelitian ini adalah adanya model pembaharuan hukum yang mengatur pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang selaras dan serasi antara perda-perda propinsi dan perda-perda daerah kota/kabupaten di Jawa Timur. Hal ini sebagaimana agenda pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengoptimalkan peningkatan daya saing UMKM secara sistematis dan terpadu yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pembiayaan, jejaring usaha, pengaturan kemitraan, pelaporan, penciptaan iklim, perlindungan dan pengembangan usaha serta penerapan sanksi. Target khusus yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah melakukan evaluasi kesesuaian perda-perda provinsi dan perda-perda daerah kota/kabupaten tersebut dengan menggunakan dua indikator (alat ukur) utama yakni indikator substansial dan prosedural. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan *statuta approach*, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan, karena pada tahun-tahun sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian pendahuluan dalam rangka mengidentifikasi potensi UMKM di beberapa daerah di Jawa Timur. Penelitian pendahuluan tersebut juga telah memetakan beberapa permasalahan hukum yang biasa dihadapi oleh UMKM di Jawa Timur utamanya ketika dihadapkan dengan persaingan di pasar ASEAN. Pada tahun pertama, diketahui bahwa terdapat beberapa pengaturan tentang UMKM di Kota/Kabupaten yang telah sesuai, yang belum sesuai, dan belum mengatur ketentuan-ketentuan indikator indikator yang telah ditetapkan dalam Perda Propinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Ada juga beberapa kota/kabupaten yang memiliki nilai inovatif dalam pemberdayaan UMKM. Hasil analisis tersebut dapat dijadikan acuan evaluasi bagi perda-perda baik propinsi maupun daerah kota/kabupaten dalam rangka melakukan pembaharuan hukum UMKM di Jawa Timur. Pada tahun pertama ini juga, telah ditemukan model pembaharuan hukum bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Jawa Timur baik di tingkat Provinsi maupun Kota/ Kabupaten dalam Rangka Peningkatan Daya Saing di Pasar ASEAN yang menggunakan ketentuan-ketentuan indikator indikator yang telah ditetapkan dalam Perda Propinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah., akan tetapi sudah disesuaikan dengan hasil analisis baik perda UMKM tingkat propinsi maupun Kota/kabupaten. Selain itu model pembaharuan hukum UMKM di Jawa Timur ini juga telah disesuaikan dengan berbagai pengaturan tingkat regional dalam rangka pasar bebas ASEAN. Sehingga pada tahun kedua diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan Naskah Akademik (NA) yang dapat dijadikan pedoman pembaharuan hukum UMKM di Jawa Timur baik ditingkat propinsi maupun kota/ kabupaten dengan menggunakan indikator-indikator baru yang telah ditemukan ditahun pertama.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Idris, Rachminawati, Mulyana, Editor, *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional*, Fikahati Aneska bekerjasama dengan bagian Hukum Internasional Universitas Padjadjaran, Bandung, 2012.

Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Muatan Materinya*. Yogyakarta: Kanisius.

Soekanto, S., Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sutrisno, Joko & Lestari, Sri, 2006, *Kajian Usaha Mikro Indonesia*, Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM, Nomor 2 Tahun I-2006.

Tulus TH Tambunan. 2009. *UMKM di Indonesi*. Ghalias Indonesia.

Karya Ilmiah

Adriani, SS, 2001, *Jepitan Struktur dan Kultur: Catatan Reflektif Penelitian atas Lembaga Keuangan Mikro*, Jurnal Analisis Sosial, Vol. 6, No. 3, Bandung.

Biro Kredit Bank Indonesia, Bank Sentral Republik Indonesia, *kajian Identifikasi Peraturan Pusat dan Peraturan Daerah Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, 2007.

Hikmahanto Juwana, *Politik Hukum Bidang Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 23 No. 2 Tahun 2004.

Laporan Kementerian Perdagangan RI Tahun 2011, "*Perkembangan Masyarakat Ekonomi ASEAN, ASEAN Community in Global of Nations*".

Laporan/Kajian Kelembagaan Kajian Ekonomi Regional Jawa Timur, Triwulan I Tahun 2012, Bank Indonesia Surabaya.

Laporan Center for Banking Research Universitas Andalas, *Upaya Penguatan Peran Microbanking dan Pendekatan Pembiayaan Kelompok dalam Rangka Pengembangan UMK di Sumatera Barat*, 2007.

Laporan Kerjasama Lembaga Penelitian SMERU dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, *Studi Pemetaan Upaya Penguatan Usaha Mikro*, 2003.

Maskie, Hamidah, Kusumaningrum, Wahyudi , *Dasar Potensi Ekonomi daerah dalam Rangka Pengembangan Komoditi Unggulan Usaha Mikro Kecil dan*

menengah (UMKM) di Kabupaten Blitar, Kota Blitar dan Kabupaten Trenggalek, Bank Indonesia dan Lembaga Riset Perbankan Jawa Timur (LRPD), 2011

P. Agung Pambudhi, *Pengaruh Perda Terhadap Aktivitas Perekonomian Daerah (UMKM)*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007

Sihabuddin, Sukarmi, Hamidah, Kusumaningrum, *Evaluasi Peraturan Perbankan yang Menghambat Pembiayaan Usaha Kecil di Jawa Timur*, Bank Indonesia dan Lembaga Riset Perbankan Jawa Timur (LRPD), 2006.

Siti Hamidah, Reka Dewantara, *Analisis Strategi Kebijakan tentang Lembaga Pembiayaan Bagi Usaha Mikro berdasarkan Social Capital di Kabupaten Madiun (Studi pada Masyarakat Sekitar Hutan Penghasil Porang di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan)*, Hibah Penelitian IMHERE, 2010

Sukarmi, Gozali Maskie, Adi Kusumaningrum, Perdana Rahadian, *Analisis Potensi Bisnis UKM Jawa Timur dalam Rangka Menghadapi Integrasi Pasar Asean*, Bank Indonesia dan Lembaga Riset Perbankan Jawa Timur (LRPD), 2007.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Kecil Mikro dan Menengah

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Daerah Kota Lamongan Nomor 7/2008 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Mikro

Peraturan Daerah Kota Mojokerto dengan Perda No. 19 Tahun 2008 tentang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2015

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 7 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No. 19 Tahun 2008 Tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No. 7 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No. 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No. 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2023

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 5 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP)

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 23 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Kabupaten Tulungagung

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Tulungagung

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 6 tahun 2010 tentang Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern

Peraturan Daerah No. 10 tahun 2011 Tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No. 11 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto

Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Perlindungan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Perda Nomor 1 Tahun 2012 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2012, Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan APBD Tahun 2012

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Blitar

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2011 – 2015

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Blitar

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan (WDP)

Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar

Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir untuk Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)